

# INDUSTRIALISASI SEKTOR PARIWISATA: Pintu Masuk Pembangunan atau Pelembagaan Keterbelakangan?<sup>1</sup>

Heru Nugroho

*The tourism sector, the 'savior' of foreign exchange receipts, will be faced with a dilemma in the future. On the one hand, this sector promises to raise vast amounts of foreign exchange which can be used as a mainstay of economic growth. On the contrary, since the standard of tourism is determined on an international level, no moves have been made towards developing local tourism. It is quite feasible that this situation could lead to social disintegration, cultural degradation, and ecological deterioration. The fundamental, pressing concern is not simply one of choosing between these two alternatives, but rather of formulating strategies for the development of national tourism, by weighing up the force of international tourism against local tourism conditions. Representing the general public, the state has a role to play in the tug of war between the demands of the international tourism industry and the potential of local tourism, by formulating strategies for tourism which are beneficial to the public.*

*Keywords:* tourism; Indonesia; International; trend.

Dalam sepuluh tahun terakhir, penerimaan devisa negara dari sektor migas mengalami penurunan. Pada tahun 1984/85 sektor migas menyumbangkan US\$14 miliar, kemudian pada tahun 1993/94 merosot menjadi US\$ 9,7. Sedang pada saat yang sama terjadi peningkatan impor migas sebesar 5 persen per tahun, sementara nilai eksportnya mengalami stagnasi. Banyak pengamat memperkirakan bahwa dalam 10 tahun mendatang sektor ini tidak lagi memberikan sumbangan (neto) dalam penerimaan devisa. Bahkan diduga dengan tingkat eksplorasi seperti yang dilakukan

sekarang ini, keterbatasan teknologi eksplorasi yang kita miliki, menipisnya cadangan energi minyak bumi nasional, dan meningkatnya kebutuhan migas dalam negeri, akan meningkatkan nilai impor migas dari tahun ke tahun.

Kalau hal ini dibiarkan berlarut-larut maka negara akan mengalami defisit neraca perdagangan yang berkelanjutan. Memang untuk sementara sektor nonmigas dapat menjadi pemacu pertumbuhan ekspor nasional dengan rata-rata pertumbuhan 21 persen pada periode 1985-1993. Namun beberapa pengamat mulai me-

<sup>1</sup> Penulis mengucapkan terima kasih kepada Sdr. Ari Sujito (PUSPAR-UGM) atas bantuannya sehingga terselaksainnya artikel ini, namun demikian seluruh isi merupakan tanggungjawab penulis.

ragukan ketahanan daya saing ekspor nonmigas kita, karena sampai dengan tahun 1994 sektor tersebut masih didominasi oleh teknologi rendah dan padat karya seperti tekstil, pakaian jadi, produk kayu, dan lain-lain. Selain itu kenaikan tingkat upah, baik nyata atau minimum, dan akan dicabutnya secara bertahap hingga 2005 *Multilateral Fiber Arrangement* yang selama ini menjadi andalan dalam menembus pasar di beberapa negara maju, maka *captive market* produk tekstil yang kita miliki juga akan menghilang sehingga kita dihadapkan pada kompetisi global dalam perdagangan tekstil.

Untuk itu dibutuhkan sektor unggulan yang dapat menghindarkan Indonesia dari pembengkakan defisit transaksi berjalan yang pada tahun 1995 sebesar US\$ 7,5 miliar dan tahun 1996 menggelembung menjadi US\$ 8,5 miliar. Tidaklah berlebihan kalau sektor pariwisata dijagokan oleh pemerintah sebagai "dewa penyelamat" bagi penerimaan devisa, karena selama 20 tahun terakhir ini sektor tersebut menunjukkan kinerja yang mantap. Sektor pariwisata mampu tumbuh secara konsisten dalam angka belasan persen sehingga diharapkan akan menjadi garda terdepan dalam perekonomian nasional kita pada masa-masa mendatang. Oleh karena itu satu hal penting dan perlu diperhitungkan adalah keberadaan konfigurasi sistem ekonomi-politik dunia yang dapat menjadi pendorong maupun penghambat dalam memacu perkembangan industri pariwisata kita dewasa ini. Tulisan ini secara makro berusaha memahami problema tersebut dengan jalan membeberkan dilema yang sedang dihadapi oleh industri pariwisata bagi negara-negara sedang berkembang, dengan *entry point* industri pariwisata di tanah air.

## Signifikansi Industri Pariwisata

Secara optimis pada abad 21 nanti kepariwisataan akan menjadi salah satu kegiatan sosial-ekonomi yang terpenting di dunia dan akan menjadi salah satu industri ekspor terbesar di dunia (WTO, 1994). Data resmi dan sekaligus prediksi dari pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pariwisata (Dirjenpar), menggambarkan bahwa perolehan devisa industri pariwisata pada tahun 1995 mencapai kurang lebih US\$ 5,24 miliar dengan kunjungan wisatawan manca negara (wisman) sebesar 4,32 juta orang. Ini merupakan prestasi awal kenaikan karena pada tahun 1994 perolehan devisa kita dari sektor ini sekitar US\$ 4,7 miliar dengan kunjungan wisman sebesar 4 juta orang. Sedang pada triwulan I tahun 1996, devisa yang diraih mencapai US\$ 1,58 miliar dengan kunjungan 1,29 juta wisman. Berdasarkan informasi tersebut dapat diperkirakan bahwa devisa tahun ini akan mencapai US\$ 6 sampai US\$ 7 miliar dengan kunjungan wisman 5,5 sampai dengan 6 juta orang. Dengan demikian, transaksi kepariwisataan akan menjadi lebih besar dari pada unsur-unsur ekonomi lainnya, seperti migas, tekstil, dan lain-lain. Pada tahun 2005, sektor pariwisata diperkirakan akan menghasilkan devisa sebesar US\$ 15 miliar atau sekitar 33,75 triliun rupiah dengan kunjungan 11 juta wisatawan. Mampukah Indonesia melakukan percepatan pertumbuhan sektor pariwisata, dalam rangka melampaui target yang dimaksudkan agar pertumbuhan ekonomi nasional dapat terus-menerus dipertahankan dan kesejahteraan masyarakat secara luas tercapai?

Mengingat industri kepariwisataan merupakan salah satu bidang yang kom-

Tabel 1. Wisman dan Perolehan Devisa di Indonesia dalam US \$, 1990-1995

Tahun	Wisman	Perolehan (US \$ Juta)	Pertumbuhan	
			Wisman	Devisa
1990	2.177.566	2.105,3	33,9	63,9
1991	2.569.870	2.522,0	18,0	19,8
1992	3.064.161	3.278,2	19,2	30,0
1993	3.403.138	3.986,6	11,1	21,6
1994	4.006.312	4.785,3	17,7	20,0
1995	4.324.229	5.240,1	7,9	9,5

Sumber: Dirjenpar, 1995

pleks, maka sektor ini tidak dapat dipandang hanya dari salah satu sisi positifnya, yaitu seperti mengharapkan datangnya perolehan devisa, tetapi sisi negatifnya juga harus diperhitungkan (De Kadt, 1979). Lebih dari itu bagaimana komitmen pemerintah beserta *stakeholders* pariwisata yang lain dalam merespon persaingan yang kian menajam pada era globalisasi ini. Yang kadang-kadang luput dari perhatian para pengamat sosial ekonomi adalah bekerjanya berbagai faktor di balik industri kepariwisataan, baik faktor-faktor sosial, politik kebudayaan, bahkan konfigurasi "sistem dunia" (Wallerstein, 1974) yang ada saat ini. Industri pariwisata pada dasarnya juga berkaitan dengan keterlibatan dan bertemunya berbagai kepentingan ekonomi politik banyak negara (De Kadt, 1979). Bagi negara-negara sedang berkembang tidak akan pernah lolos dari gesekan kepentingan ekonomi politik dengan negara-negara industri maju lainnya. Oleh karena itu harus diakui bahwa pembicaraan kepariwisataan sebagai salah satu program utama negara tidak dapat dilepaskan dari keterkaitannya dengan ketegangan ekonomi politik internasional. Hal ini merupakan bukti bahwa industri pariwisata tidak dapat dipahami secara *one sided* tetapi multi-dimensional dan multidisiplin.

Persoalan itulah yang kemudian menjadi inspirasi bagi penulis, dan barangkali para pengamat kepariwisataan yang lain atau lembaga-lembaga kajian pariwisata, untuk membahas perdebatan secara dialogis dalam rangka membentuk wacana kritis industri kepariwisataan. Dua perspektif yang akan diperdebatkan dalam upaya mencari manfaat sosio-ekonomi industri pariwisata adalah faham *political economy* berhadapan dengan aliran berpikir *developmentalist*. Tulisan ini berupaya mencari relevansi intelektual dan sosial kedua pendekatan tersebut dan berupaya mencari solusinya, atau bahkan memahami dilema yang muncul dalam industri pariwisata, khususnya untuk negara-negara berkembang.

## Kontroversi Pengembangan Pariwisata

Sejauh ini masih terdapat kontroversi, baik pada tingkat akademik maupun praktis, tentang hubungan antara industrialisasi pariwisata dengan pembangunan di negara-negara berkembang. Dengan mendasarkan pada pemahaman perspektif ekonomi politik (*political economy*), ekspansi dan penetrasi pariwisata internasional ke negara-negara berkembang telah menimbulkan dampak negatif, yaitu

dengan mengacu pada perhitungan *cost-benefit*, fihak mana yang lebih diuntungkan dari terselenggaranya industri tersebut (De Kadt, 1979). Berdasarkan kenyataan, industri pariwisata bukan hanya dianggap telah gagal memainkan peran sebagai "paspor untuk menuju pembangunan" bagi negara-negara berkembang seperti yang diharapkan kaum *developmentalist* tetapi dalam praktik justru seringkali bertindak sebagai instrumen pelembagaan keterbelakangan yang dikonstruksikan oleh negara-negara industri. Contoh kasus konkretnya adalah cenderung terjadi monopoli jaringan penerbangan dan hotel-hotel internasional oleh korporasi-korporasi multinasional. Industri pariwisata global tidak jarang menentukan pilihan negara-negara dan obyek-obyek tujuan wisata, dan bahkan turut menentukan bagaimana kondisi obyek-obyek rekreasi di negara-negara sedang berkembang harus dibangun. Dengan demikian standarisasi industri pariwisata di negara-negara sedang berkembang dideterminasi oleh industri pariwisata multinasional yang berpusat di negara-negara maju.

Dalam situasi seperti itu, subsidi pemerintah dalam bentuk *taxshelter* dan pembebasan pajak impor material atau peralatan berimplikasi terhadap perkembangan pariwisata internasional. Kondisi industrial seperti ini ternyata cenderung menuntut biaya yang tinggi dengan terabaikannya kepentingan-kepentingan lokal. Pariwisata internasional juga seringkali mereka gugat karena telah mengakibatkan terjadinya aliran kapital keluar (*capital flight*) dari negara-negara berkembang ke negara-negara maju, menguatkan berkembangnya ekonomi monokultur berdasarkan penerimaan hotel, mendorong terjadinya *defisit* pembayaran luar negeri yang kronis, menciptakan

lapangan kerja musiman, serta menciptakan kegagalan dalam mengembangkan industri kerajinan tradisional pada tingkat lokal. Pariwisata internasional yang sarat dengan berbagai aturan baku industrial juga seringkali ditunjukkan oleh perspektif ekonomi politik sebagai sumber atau biangkeladi bagi terjadinya berbagai bentuk disintegrasi sosial-budaya degradasi dan deteriorasi ekologis.

Sebaliknya menurut perspektif *developmentalist* (Pye dan Lin, 1983) menegaskan bahwa pasar internasional justru banyak menyumbangkan kecepatan, percepatan dan arah perkembangan pariwisata di negara-negara berkembang. Pariwisata memiliki potensi yang memungkinkan bagi perumusan strategi pembangunan di negara-negara berkembang sehingga dianggap sebagai "pintu masuk" bagi kesejahteraan masyarakat. Selain sebagai sumber penerimaan devisa, industri pariwisata dirasakan pula memiliki banyak elemen yang dapat mendorong transformasi ekonomi, dari karakter negara pertanian yang tradisional menuju masyarakat moderen industrial. Dari kondisi masyarakat yang subsisten menuju masyarakat yang berorientasi pasar. Proses transformasi itu dapat terjadi karena kemampuan sektor pariwisata dalam penciptaan berbagai kaitan ke belakang; antara lain mendorong berkembangnya teknologi padat karya, usaha-usaha bidang kepariwisataan yang berskala kecil dan dimiliki serta dioperasikan secara lokal, dan menuntut impor yang minimal. Pariwisata dapat menghemat penggunaan devisa dan menciptakan "efek demonstrasi" di kalangan masyarakat yang menyadari semakin terbukanya peluang-peluang alternatif dalam memperoleh keuntungan ekonomi (Pye dan Lin, 1983). Sebagai contoh, kawasan Asia-Pasifik yang mengalami pertumbuhan

ekonomi luar biasa akhir-akhir ini juga mendapat berkah dari industri pariwisata. Kawasan ini telah mampu mendatangkan penerimaan devisa lebih dari US\$ 70 miliar dari sektor pariwisata. Negara-negara yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi diduga telah mampu menarik wisatawan manca negara untuk tinggal lebih lama dan membelanjakan uang lebih banyak. Selain itu negara-negara yang mampu melakukan stabilisasi nilai mata uangnya dengan US dollar juga mendapatkan berkah dari bisnis pariwisata (Abimanyu, 1997). Beberapa negara yang mampu melakukan

manajemen mata uang secara stabil antara lain, Korea Selatan, Thailand, dan Australia, diduga menempati urutan atas dalam tujuan wisata. Perkembangan pariwisata internasional sebagai elemen sangat penting untuk pembangunan ekonomi bagi negara-negara berkembang, telah menemukan aktualisasinya dengan menyusul terjadinya transformasi industri pariwisata internasional sebagai akibat bertemunya sejumlah kecenderungan yang terjadi pada tingkat internasional maupun lokal. Sebelumnya bentuk industri pariwisata internasional sangat bersifat masif, terstandar, dan terorganisasi dalam paket-

**Tabel 2. Penerima Devisa Sektor Pariwisata pada 16 Negara-negara Asia-Pasifik, 1995**

Ranking		Negara	Penerimaan (US\$ Juta)	Perubahan 94/95 (%)
1985	1995			
1	1	Hong Kong	9.075	9.1
7	2	Cina	8.733	19.3
3	3	Thailand	7.556	31.1
2	4	Singapura	7.550	6.8
5	5	Australia	6.875	15.4
9	6	Rep. Korea	5.579	46.6
11	7	Indonesia	5.228	9.4
10	8	Malaysia	3.500	9.8
8	9	Taiwan	3.500	9.0
4	10	Jepang	3.250	-6.5
-	11	Macau	2.500	-7.0
6	12	Filipina	2.340	2.5
12	13	Selandia Baru	1.492	9.9
13	14	Guam	1.275	16.4
15	15	N. Mariana I	655	12.2
14	16	Fiji	348	16.8
		<b>Total 1-15</b>	<b>69.108</b>	<b>12.55</b>
		<b>Total EAP</b>	<b>69.456</b>	<b>13.4</b>

Sumber: WTO, 1995

paket yang sangat ketat. Saat ini terdapat kecenderungan baru pariwisata internasional, atau industri pariwisata yang menemukan momentumnya pada era liberalisasi dan globalisasi pada abad ke 21 mendatang. Bentuk-bentuk pariwisata baru tersebut berpusat dalam fleksibilitas, segmentasi, dan integrasi diagonal. Kecenderungan seperti itu lazim disebut sebagai "The New Global Division of Tourism".

## Kecenderungan Baru Pariwisata Internasional<sup>2</sup>

Pariwisata alternatif yang dimaksud dalam perkembangan belakangan ini ternyata menjadi arus lebih kuat dalam melawan pariwisata massal (*mass tourism*). Pariwisata jenis ini merupakan tindakan berwisata yang lebih bertanggung jawab, karena yang dicari terutama bukan semata-mata kepuasan ragawi, seperti eksploitasi seksual, tetapi ketenangan dan kesejukan jiwa. Jenis wisatawan alternatif dipandang lebih menyandarkan pada minat khusus dengan mengutamakan persinggungan penduduk dan kebudayaan lokal. Dibandingkan dengan tawaran industri pariwisata massal sifatnya lebih artifisial. Jika yang diharapkan semata-mata adalah pertumbuhan ekonomi melalui penerimaan devisa yang tinggi, jenis wisata ini memang tidak bisa terlalu diharapkan. Namun dari wisata alternatif misi persahabatan, perdamaian dan pemahaman *cross culture* disampaikan langsung kepada masyarakat awam. Maka rumusan dari wisata minat khusus pada dasarnya adalah suatu bentuk perjalanan wisata, dimana wisatawan mengunjungi suatu tempat karena memiliki minat atau tujuan khusus mengenai sesuatu jenis objek atau

kegiatan yang dapat ditemui dan dilakukan di lokasi daerah tujuan wisata tersebut (Martin, 1990).

Kalau kita merujuk pada pernyataan *World Tourism Organization* (WTO) maka dapat diketahui terdapat beberapa kecenderungan dan perkembangan baru dalam dunia pariwisata yang terjadi pada sekitar 1990-an. Hal ini ditandai dengan berkembangnya kesadaran lingkungan dalam pengertian yang luas. Ini terwujud dalam gaya hidup dan kesadaran baru akan penghargaan yang lebih mendalam terhadap nilai-nilai hubungan antarmanusia maupun dengan lingkungan alam, baik fisik maupun sosial. Perkembangan baru tersebut secara khusus ditunjukkan melalui bentuk-bentuk keterlibatan wisatawan dalam kegiatan-kegiatan di luar lapangan, seperti kepedulian ekologis dan kelestarian alam, kemajuan ilmu pengetahuan dan pendidikan, penekanan dan penghargaan pada nilai-nilai estetika, kebutuhan akan pengembangan diri/pribadi, serta keinginan untuk hidup berinteraksi secara mendalam dengan masyarakat. Ini merupakan wisata yang menghindarkan orang dari deteriorasi ekologis dan degradasi budaya sehingga perlu diperkuat kehadirannya.

Wisata minat khusus menekankan pada beberapa hal dalam implementasinya. *Pertama*, motivasi pencarian pada sesuatu yang unik/spesifik dan baru (*novelty seeking*), dan yang lebih menantang pada lokasi-lokasi baru untuk jenis atraksi yang diminati. *Kedua*, motivasi pencarian pada pengalaman wisata yang berkualitas (*quality seeking*). Dalam konteks Indonesia dikenal beberapa produk wisata minat khusus seperti "wisata alam" yang berupa alam hutan, perairan kedalaman (*diving*), wisata geologi vulkanik (*climbing* dan *ca-*

<sup>2</sup> Seminar tentang "Kecenderungan Baru Pariwisata Internasional dan Dampaknya bagi Negara-negara Berkembang" pernah diselenggarakan oleh Pusat Studi dan Pengembangan Pariwisata (PUSPAR) UGM, di Yogyakarta, pada tgl. 26 Maret 1996.

ving), wisata bahari, serta wisata agro; "wisata budaya" yang berbentuk peninggalan-peninggalan sejarah, kehidupan masyarakat; "wisata buatan" yang meliputi olah raga (misal: *bungee jumping*, *speed boat*, dan lain-lain) dan beberapa rekreasi khusus yang lain.

Dengan terjadinya difusi teknologi informasi yang semakin merata, deteriorasi lingkungan yang sedang menuju ambang kritis, perubahan pola kerja dan pemanfaatan waktu luang di negara-negara industri baru dan berkembang, dan sejumlah faktor yang lain, telah memaksa sistem pariwisata lokal untuk menjawab perkembangan pariwisata internasional dengan cara-cara yang sangat berbeda dari yang selama ini dilakukan di negara-negara berkembang. Pergeseran-pergeseran mendasar juga tengah terjadi di dalam preferensi konsumen, yang telah memaksa daerah-daerah tujuan wisata untuk menjadi lebih inovatif di dalam upaya menarik wisatawan manca negara. Kalau perspektif yang kita gunakan dalam memahami industri pariwisata global adalah *developmentalist*, maka perkembangan wisata alternatif tersebut bukan semata-mata akibat dari laju perkembangan pariwisata internasional, tetapi juga akibat dari dinamika industri pariwisata yang terjadi pada tingkat lokal. Jadi logika permintaan-penawaran juga berlaku dalam bidang kepariwisataan.

Dalam proses negosiasi antara kecenderungan-kecenderungan yang terjadi pada tingkat global dan lokal, usaha kecil dan menengah dalam sektor pariwisata juga menemukan perannya yang semakin strategis bagi pembangunan ekonomi negara-negara sedang berkembang, khususnya bagi pemberdayaan ekonomi rakyat di daerah pedesaan. Pariwisata internasional selain dipandang dapat merealisasikan *transfer of welfare* dari global

ke lokal, dengan demikian juga dapat mendinamisasikan perkembangan ekonomi daerah, termasuk di dalamnya industri kecil, kerajinan tradisional bahkan meningkatkan taraf hidup para pekerja sektor informal. Hal ini terjadi selama beberapa tahun terakhir bersamaan terus merosotnya ekonomi pedesaan di banyak negara sedang berkembang oleh tekanan-tekanan korporasi multinasional yang telah mengakibatkan menurunnya penciptaan peluang kerja dan kemakmuran masyarakat pedesaan negara-negara yang bersangkutan. Solusi mendasar atas masalah yang sangat kompleks itu harus ditemukan dalam upaya yang berkesinambungan dan sistematis, untuk menjadikan ekonomi negara-negara sedang berkembang lebih kompleks dan beragam melalui industrialisasi pedesaan yang didesentralisasikan. Hal ini termasuk pengembangan industri kecil, menengah, jasa dan sektor informal dalam konteks pengembangan terkait dengan sektor pariwisata. Globalisasi memang telah mendatangkan dilema, namun dengan strategi yang jitu dalam bidang kepariwisataan, globalisasi dapat mendatangkan kesejahteraan pada tingkat lokal.

Pertanyaan paling mendasar yang perlu dicermati dan dicari jawabnya adalah bagaimana kepentingan-kepentingan berbagai *stakeholders* industri pariwisata dipertemukan di dalam sistem pengembangan pariwisata nasional kita? Bagaimana anatomi dan dinamika operasionalisasi industri pariwisata di Indonesia? Seberapa besar peluang untuk menjadikan pariwisata sebagai elemen strategis bagi pembangunan nasional kita? Atau dengan kata lain bagaimana caranya mendekonstruksikan pernyataan pariwisata internasional sebagai "instrumen pelemagaan keterbelakangan" menjadi "pintu masuk" perkembangan masyarakat dalam arti luas?

## Kebocoran Devisa, Difusi Pariwisata dan SDM

Dari pengalaman banyak negara berkembang, dalam hal ini contoh yang paling konkret adalah negara-negara ASEAN, maka dapat diketahui bahwa ekspansi industri pariwisata internasional hanya memberikan *share* yang sangat kecil, yaitu 10-30 persen, dari jumlah devisa yang diciptakan. Pada umumnya negara-negara di kawasan ASEAN masih mengandalkan wisatawan yang datang dari wilayah Asia, khususnya ASEAN (tahun 1995 = 58,09 persen) dan Jepang (16,02 persen). Pasar potensial seperti Eropa dan wilayah Amerika belum secara potensial mempengaruhi perkembangan industri pariwisatanya secara signifikan (Abimanyu, 1997). Oleh karena itu untuk mendayagunakan pasar potensial tersebut, berbagai strategi ekspansif untuk menarik wisatawan dari kedua kawasan itu perlu dirumuskan, bila industri pariwisata di ASEAN akan dijadikan pilar pertumbuhan ekonomi regional.

Namun perlu disadari pula bahwa pertalian timbal balik yang saling menguntungkan antara pariwisata dan pem-

angunan tentu saja membutuhkan sejumlah persyaratan. Ekspansi pariwisata ke kawasan-kawasan "perawan" yang selama ini tidak pernah tersentuh oleh arus modernisasi dalam bentuk apapun akan menimbulkan beragam dampak sosial, ekonomi, dan politik. Seperti munculnya ketimpangan sosial, marginalisasi etnis tertentu dan pemburukan lingkungan. Kecuali persyaratan bagi perlindungan terhadap masyarakat lokal dipenuhi, jenis pariwisata manapun senantiasa dapat menghadirkan ancaman dampak negatif bagi eksistensi dan pelestarian masyarakat lokal dan juga bagi pembangunan yang berkelanjutan. Di antara syarat yang paling krusial yang dimaksudkan adalah kebijakan pengembangan pariwisata nasional kita hendaknya diorientasikan pada pengembangan produk-produk yang berskala kecil, dengan demikian dapat dikelola oleh pelaku-pelaku ekonomi lokal, dapat menimbulkan dampak sosio-kultural yang minimal, dan bersifat memberdayakan masyarakat lokal dalam pengertian ekonomi politik.

Ada tiga kesimpulan yang telah dirumuskan oleh WTO berkaitan dengan perkembangan industri pariwisata di ma-

Tabel 3. Tingkat Kunjungan Wisman (000), Pertumbuhan dan *Share* di Negara-negara ASEAN

Tujuan	1990			1993			1995		
	Jumlah	Pertumb.	Per-sentase	Jumlah	Pertumb.	Per-sentase	Jumlah	Pertumb.	Per-sentase
Indonesia	2.178	33.95	12.79	3.403	56.24	17.01	4.324	27.06	15.68
Malaysia	3.209	66.27	18.84	3.048	-5.02	15.23	7.469	145.04	27.08
Filipina	1.025	-13.87	6.01	1.372	33.85	6.86	1.702	24.05	6.17
Singapura	5.323	10.21	31.25	6.426	20.72	32.11	7.138	11.08	25.88
Thailand	5.299	10.17	31.11	5.761	8.72	28.79	6.952	20.67	25.20
	17.034	18.41	100	20.010	17.47	100	27.585	37.86	100

Sumber: *Asia Pacific Forecast to 2005*, dikutip dari Abimanyu, 1996.



sa mendatang. *Pertama*, pariwisata identik dengan kehidupan moderen, dan dalam kondisi resesi ekonomi dunia yang berkepanjangan sektor ini telah mampu bertahan dengan pertumbuhan yang relatif tinggi. Untuk kasus Indonesia, sektor pariwisata telah mampu tumbuh dalam angka belasan persen secara konsisten selama dua dekade terakhir. *Kedua*, meskipun kegiatan industri pariwisata masih terkonsentrasi di kawasan-kawasan tertentu, namun secara lambat ataupun cepat kegiatannya cenderung mulai menyebar ke berbagai wilayah penjurus dunia, terutama di negara-negara berkembang. *Ketiga*, pertumbuhan dan perkembangan industri pariwisata merupakan tantangan bagi perkembangan ekonomi, sosial dan budaya bagi setiap negara yang memiliki potensi. Maka adalah wajar jika sektor pariwisata dianggap sebagai *passport to development* bagi negara-negara tertentu, yaitu bagi negara-negara berkembang pada umumnya dan Indonesia secara khusus.

Berdasarkan proyeksi WTO (1994), dalam jangka waktu 20 tahun mendatang pertumbuhan kunjungan pariwisata internasional akan meningkat dua kali lipat. Pada tahun 1990 kunjungan wisata berkisar 94 juta orang, sedangkan tahun 2010 menjadi 207 juta orang. Pada periode 1990 - 2010, Eropa dan Amerika tetap menjadi tujuan wisata yang paling tinggi dengan rata-rata pertumbuhan masing-masing 2,6 persen dan 4,1 persen, tetapi rata-rata pertumbuhan tertinggi ada di kawasan Asia Timur dan Pasifik sebesar 6,7 persen dan kawasan Asia Tenggara sebesar 6,1 persen. Kegiatan pariwisata mulai menyebar ke kawasan tersebut, termasuk Indonesia tentunya, dengan tingkat perkembangan yang cukup mengesankan. Kondisi seperti ini akan mendorong ting-

kat pertumbuhan ekonomi negara dengan efek *multiplier*. Artinya, pertumbuhan kegiatan industri pariwisata akan menimbulkan dampak bergairahnya bidang-bidang kehidupan lain seperti jasa, transportasi, informasi, perdagangan, dan lain-lain.

Selain berlangsungnya perencanaan pengembangan industri pariwisata, juga diperlukan kesiapan penataan kelembagaan yang tersruktur secara desentralisasi dalam memainkan perannya masing-masing. Kesiapan Indonesia dalam menggaet sebanyak mungkin wisman juga banyak dipengaruhi dan harus didukung oleh faktor pelayanan yang disajikan oleh pemberi jasa pariwisata. Hal ini dilandasi oleh suatu argumen bahwa bisnis pariwisata adalah identik dengan bisnis pelayanan itu sendiri. Maka asumsinya adalah apabila pelayanan yang diberikan oleh masyarakat secara baik, industri pariwisata juga akan tumbuh dan dapat diharapkan sebagai pilar perekonomian masyarakat. Selain itu, hal yang paling mendasar yang perlu diperhatikan juga oleh para pelaku bisnis pariwisata adalah ketersediaan sejumlah sumberdaya manusia (SDM) yang dimiliki oleh masing-masing *stakeholders* industri pariwisata, baik pada tingkat nasional, wilayah maupun kawasan yang bakal dikembangkan. Dari pengalaman negara-negara maju yang telah mendahului dalam perkembangan kepariwisataan, SDM menjadi faktor krusial dalam bisnis pariwisata.<sup>3</sup> Pemerintah sebagai penyelenggara utama administrasi birokrasi, pelaku industri pariwisata terutama pihak swasta, bahkan yang sangat mungkin adalah sebrapa besar respon dari masyarakat lokal di sekitar daerah pariwisata, termasuk LSM-LSM juga perlu diperhitungkan. Satu hal penting

<sup>3</sup> Hal ini untuk mengantisipasi kritik yang telah dilontarkan oleh berbagai pihak, bahwa kualitas SDM yang kita miliki dari hasil pendidikan kepariwisataan selama ini belum memadai (Kompas, 25 Juli 1997)

yang juga harus diperhitungkan dan direalisasikan adalah terwujudnya *clean government*, karena bagaimanapun juga tingkat korupsi, kebocoran dana dan penyelewengan aparat yang cukup tinggi akan turut serta dalam menghambat laju perkembangan industri pariwisata.

## Penutup

Kendati analisis ini masih bersifat tentatif dan sedikit "spekulatif", namun kenyataan kecenderungan baru perkembangan pariwisata internasional telah menjanjikan banyak elemen yang akan membuat sektor ini secara ekologis *sound*, secara ekonomis *viable*, secara sosial *acceptable* dan secara politis *empowering*. Pariwisata menjadi sektor multi-dimensional dan multi-disiplin yang perkembangannya tidak saja membawa dampak *multiplier* dalam pengertian sempit ekonomi, tetapi lebih dari itu juga mewujudkan transformasi sosial, budaya

bahkan sangat dimungkinkan politis. Lebih lanjut, jika kita bersepakat untuk melangkah lebih jauh dari pengembangan pariwisata alternatif dalam artian yang sempit, seperti yang biasa dianut oleh para praktisi "*green advertising*", dan sebaliknya berbicara tentang "*sustainable tourism*" yang menekankan pertalian yang kuat antara ekologi, ekonomi, dan masyarakat, serta peran komunitas lokal di dalam proses pengambilan keputusan-keputusan yang menyangkut hajat hidup dan kepentingan mereka, maka kekhawatiran akan hadirnya suatu bentuk imperialisme baru melalui ekspansi pariwisata internasional tidak perlu harus dibesarkan. Langkah konkret yang perlu diwujudkan adalah merumuskan rambu-rambu industri pariwisata agar yang terwujud adalah *transfer of welfare* dari kegiatan pariwisata internasional ke pariwisata lokal, sehingga industri ini dapat memberdayakan masyarakat di masing-masing negara berkembang.

## Referensi

- Abimanyu, Anggito (1997), "Kecenderungan Kepariwisata di Kawasan Asia Pasifik", makalah untuk seminar *Kecenderungan Baru Pariwisata Internasional' dan Dampaknya bagi Negara-negara Berkembang* diselenggarakan oleh Pusat Studi dan Pengembangan Pariwisata (PUSPAR) UGM, Yogyakarta 26 Maret 1997.
- Boniface, Priscilla dan Peter J. Fowler (1993), *Heritage and Tourism in the Global Village*, Routledge, London.
- Dekadt, Emmanuel (1979), *Tourism, Passport to Development, Perspectives on the Social and Cultural Effects of Tourism in Developing Countries*, Oxford University Press, Oxford.
- Graik, Jennifer (1991), *Resorting to Tourism, Cultural Policies for Tourist Development in Australia*, Allen Unwin, Sydney.
- Hitchcock, Michael, Victor T. King dan Michael J.G. Parnwell (1993), *Tourism in Southeast Asia*, Routledge, London.

- Martin, Chris (1990), *Special Interest Tourism*, English Tourism Board, Inggris.
- Mathieson, Alister dan Geoffrey Wall (1982), *Tourism: Economic, Physical and Social Impacts*, Longman Scientific and Technical, New York.
- Lash, Scott dan John Urry (1994), *Economies of Signs and Space*, Sage Publications, London.
- Pye, Elwood A. dan Tzong-Biau Lin (1983), *Tourism in Asia, The Economic Impact*, Singapore University Press, Singapura.
- Smith, Valene L. dan William R. Eadington (1992), *Tourism Alternatives, Potentials and Problems in the Development of Tourism*, University of Pennsylvania Philadelphia.
- Wallerstein, Immanuel (1974), *The Modern World System*, Academic Press, New York.
- World Tourism Organization (1994), *National and Regional Tourism Planning, Methodologies and Case Studies*, Routledge, London.